

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

KPU Kota Pontianak adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPU Kota Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPU Kota Pontianak. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Pontianak, Januari 2019
Sekretaris,

★ Ana Suardiana,SH

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	35
F. Pengungkapan Penting Lainnya	38
VI. Lampiran dan Daftar	46



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

Alamat Jalan Johar No.1A - Pontianak 78111

Tlp.(0561) 740021

Fax.(0561) 740021

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan KPU Kota Pontianak yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, Januari 2019

Sekretaris,



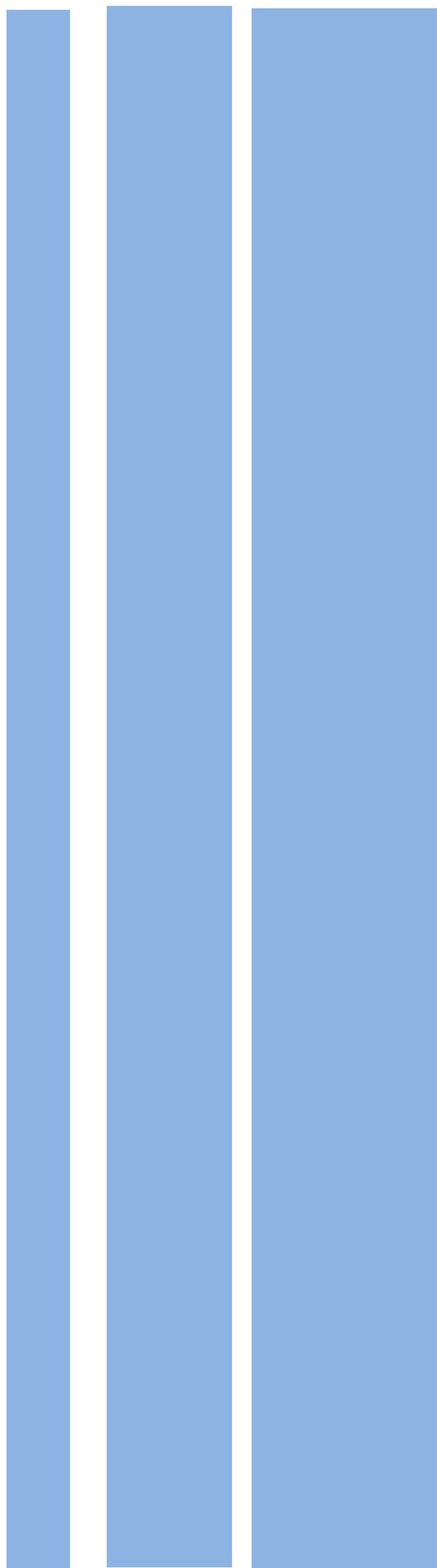
Ana Suardiana,SH

NP 19650623 199203 2 005

Komisi Pemilihan Umum

Kota Pontianak

Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2018



Jl Johar No. 1A

Pontianak, Pontianak 78111

Laporan Keuangan KPU Kota Pontianak Semester II Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 33.253.918 dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp 30.112.324.259 atau mencapai 88,84 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp33.895.492.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018. Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp 5.148.019.368 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 4.152.093.346; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0 (Nihil); Aset Tetap (neto) sebesar Rp.995.926.022; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 196.495.000

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 706.373.901 dan Rp. 4.243.543.467.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0 (Nihil), sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 28.930.636.207 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan

Operasional senilai Rp (28.930.636.207). Surplus Kegiatan Non Operasional, Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 395.914.218, sebesar Rp.301.798.224 dan sebesar Rp. 0 (Nihil) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (28.930.636.207).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp.6.045.323.640,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.(28.930.636.207) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.27.325.926.234,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp. 4.440.613.667,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KPU KOTA PONTIANAK LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2018		% thd Angg	TA 2017
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	33.253.918	0,00	20.465.091
JUMLAH PENDAPATAN		-	33.253.918	0,00	20.465.091
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	2.540.960.000	2.531.935.050	99,64	2.327.133.121
Belanja Barang	B.4	7.619.066.000	6.228.525.331	81,75	3.089.403.933
Belanja Modal	B.5	751.046.000	744.661.000	99,15	412.484.136
JUMLAH BELANJA		10.911.072.000	9.505.121.381	87,11	5.829.021.190

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KPU KOTA PONTIANAK NERACA PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	706.373.901	14.475.322
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	4.451.099.794
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	198.102.000	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	3.247.617.445	1.204.704.760
Jumlah Aset Lancar		4.152.093.346	5.670.279.876
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	2.260.894.595	1.473.833.595
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(1.264.968.573)	(1.084.414.509)
Jumlah Aset Tetap		995.926.022	389.419.086
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	196.495.000	196.495.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(196.495.000)	(196.395.000)
Jumlah Aset Lainnya		-	100.000
JUMLAH ASET		5.148.019.368	6.059.798.962
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Hibah Yang Belum Disahkan		-	400
Uang Muka dari KPPN	C.24	706.373.901	14.475.322
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	1.031.000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		707.404.901	14.475.722
JUMLAH KEWAJIBAN		707.404.901	14.475.722
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	4.440.614.467	6.045.323.240
JUMLAH EKUITAS		4.440.614.467	6.045.323.240
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.148.019.368	6.059.798.962

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KPU KOTA PONTIANAK LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 DESEMBER 2018 DAN 2017

URAIAN	CATATAN	2018	2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.531.935.050	2.327.133.121
Beban Persediaan	D.3	2.115.032.379	411.446.685
Beban Barang dan Jasa	D.4	23.526.617.996	2.592.958.415
Beban Pemeliharaan	D.5	107.385.129	31.051.000
Beban Perjalanan Dinas	D.6	864.925.807	335.509.966
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	180.654.064	131.661.629
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		29.326.550.425	5.829.760.816
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(29.326.550.425)	(5.829.760.816)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.11	32.924.000	20.465.000
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		437.346.768	336.133.725
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(74.356.550)	(54.800.501)
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		395.914.218	301.798.224
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(28.930.636.207)	(5.527.962.592)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(28.930.636.207)	(5.527.962.592)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KPU KOTA PONTIANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	E.1	6.045.323.640	1.313.630.339
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(28.930.636.207)	(5.527.962.592)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	27.325.926.234	10.259.655.893
EKUITAS AKHIR	E.5	4.440.613.667	6.045.323.640

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis KPU Kota Pontianak Pontianak

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dibentuk sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Propinsi, Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di Jalan Johar No. 1A Pontianak, mempunyai tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Paragraf 3 Pasal 10, sebagai berikut:

1. Bertugas dan berwenang dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kab/Kota.
2. Bertugas dan berwenang dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Bertugas dan berwenang dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota.

Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MISI

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
 4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak melakukan langkah langkah strategis sebagai berikut :

- Membangun KPU Kota Pontianak dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas.
- Meningkatkan kualitas pemilihan umum yang bersih,efisien dan efektif.
- Memberikan pelayanan dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara.
- Menegakan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat Kota Pontianak untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Kota Pontianak yang demokrasi.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPU Kota Pontianak Pontianak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

KPU Kota Pontianak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPU Kota Pontianak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari KPU Kota Pontianak. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPU Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban (6) **Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada

Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, KPU Kota Pontianak telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi, kondisi pada saat pelaksanaan, serta adanya penambahan dana hibah langsung berupa hibah uang untuk pelaksana kegiatan Pemilihan Serentak Tahun 2018 dari Pemerintah Kota Pontianak. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2018	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	2.306.354.000	2.540.960.000
Belanja Barang	8.301.237.000	30.523.624.000
Belanja Modal	39.236.000	830.908.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	10.646.827.000	33.895.492.000

Realisasi

Pendapatan

Rp 33.253.918

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 33.253.918 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 0 (Nihil). Pendapatan KPU Kota Pontianak dari Pendapatan Lain-lain berupa hasil lelang pemindahtanganan BMN kotak suara berbahan aluminium, bilik suara berbahan aluminium keadaan rusak berat dan hasil lelang BMN dalam keadaan rusak berat serta Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Lain-lain	-	33.253.918	
Jumlah	-	33.253.918	-

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2018 mengalami

penurunan/kenaikan sebesar 61,54 persen dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan KPU Kota Pontianak melelang kotak suara-bilik suara berbahan aluminium dalam kondisi rusak berat dan melelang BMN dalam kondisi rusak berat. Selain itu, Pendapatan Lain-lain KPU Kota Pontianak Pontianak mengalami perubahan sebesar 0 persen yang berasal antara lain dari pendapatan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari tahun anggaran yang lalu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Lain-lain	33.253.918	20.465.091	61,54
Jumlah	33.253.918	20.465.091	61,54

Realisasi

B.2 Belanja

Belanja Negara

Rp30.112.324.259

Realisasi Belanja instansi pada TA 2018 adalah sebesar Rp 30.112.324.259 atau 88,84% dari anggaran belanja sebesar Rp 33.895.492.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2.540.960.000	2.531.935.050	99,64
Belanja Barang	30.523.624.000	26.793.328.209	87,78
Belanja Modal	830.908.000	787.061.000	94,72
Total Belanja Kotor	33.895.492.000	30.112.324.259	88,84
Pengembalian		-	-
Jumlah	33.895.492.000	30.112.324.259	88,84

Dibandingkan dengan TA 2017, Realisasi Belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 88,84% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Peningkatan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal untuk mendukung rencana strategis pada TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat pegawai sehingga belanja Pegawai mengalami kenaikan.

2. Telah tersedianya anggaran Tunjangan Khusus/Kegiatan (TUKIN) dalam DIPA satker berupa tunjangan kinerja pegawai, Tunjangan Kinerja ke-13 dan Tunjangan Kinerja Hari Raya (Tunkin THR), sehingga realisasi Tunkin Pegawai dapat dilaksanakan setiap bulan.
3. Tersedianya Uang Kehormatan Komisioner KPU Kota Pontianak sebesar 100 persen dan Uang Kehormatan Komisioner KPU Kota Pontianak ke-13 serta THR bagi Komisioner KPU Kota Pontianak.
4. Adanya THR bagi pegawai honorer (PPNPN).
5. Adanya belanja sewa gudang logistik eks Pemilu.
6. Adanya penambahan pagu anggaran pada APBN-P KPU Tahun 2018 dalam rangka mendukung kegiatan persiapan Pemilu Tahun 2019.
7. Adanya tambahan belanja modal peralatan dan mesin antara lain untuk:
 - a. Koordinasi, Asistensi, Monitoring dan Evaluasi LK UAPPA dan UAPPA E-1.
 - b. Alat Penghitungan Suara.
 - c. Dukungan Tahapan Pemilu.
 - d. Layanan Teknologi Informasi Pemilu.
 - e. Pembelian Kendaraan Bermotor.
 - f. Belanja Modal kegiatan Hibah Pilwako Pontianak 2018
8. Adanya penambahan anggaran hibah langsung berupa uang untuk membiayai kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.531.935.050	2.327.133.121	8,80
Belanja Barang	26.793.328.209	3.089.403.933	767,27
Belanja Modal	787.061.000	413.484.136	90,35
Jumlah	30.112.324.259	5.830.021.190	416,50

*Belanja
Pegawai
Rp2.531.935.050*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.531.935.050 dan Rp.2.327.133.121. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 8,80 persen dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang.
2. Penambahan Tunjangan Kinerja Hari Raya (Tunkin THR).
3. Adanya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur PNS
4. Penambahan gaji dan tunjangan Non PNS (Uang Kehormatan, Uang Kehormatan ke-13 dan THR)

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.692.566.275	1.528.039.237	10,77
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	809.984.000	789.125.000	2,64
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	29.385.000	9.969.000	194,76
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	2.531.935.275	2.327.133.237	8,80
Pengembalian Belanja Pegawai	(225)	(462)	(51,30)
Jumlah Belanja	2.531.935.050	2.327.132.775	8,80

*Belanja
Barang Rp.
26.793.328.209*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.26.793.328.209 dan Rp.3.089.403.933. Realisasi Belanja Barang TA 2018 mengalami kenaikan 767,27% dari Realisasi Belanja

Barang TA 2017. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya kegiatan pelaksanaan Jadwal, Program dan Tahapan Pemilu 2019 serta Pilkada Serentak Tahun 2018 sehingga meningkatnya belanja barang operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat sepanjang Tahun 2018.

Perbandingan Belanja Barang TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	16.323.196.455	1.098.131.300	1.386,45
Belanja Barang Non Operasional	8.523.632.351	1.256.016.881	578,62
Belanja Jasa	974.188.467	283.507.034	243,62
Belanja Pemeliharaan	107.385.129	116.238.752	(7,62)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	864.925.807	335.509.966	157,79
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	26.793.328.209	3.089.403.933	767,27
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	26.793.328.209	3.089.403.933	767,27

*Belanja Modal
Rp 787.061.000*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.787.061.000 dan Rp.412.484.136. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2018 mengalami kenaikan dibandingkan TA 2017 disebabkan oleh implementasi akuntansi berbasis akrual dalam rangka pelaksanaan kegiatan persiapan Pemilu 2019 dan Pemilihan Serentak 2018, serta berakibat peningkatan kebutuhan fasilitas peralatan dan mesin.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	787.061.000	412.484.136	90,81
Jumlah Belanja Kotor	787.061.000	412.484.136	90,81
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	787.061.000	412.484.136	90,81

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 adalah sebesar Rp. 787.061.000, mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2017. Hal ini disebabkan oleh penambahan peralatan dan mesin.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Station Wagon	275.240.000	0	0,00
Laptop	137.411.000	132.894.336	3,40
UPS	79.500.000	0	0,00
Rak Besi Serbaguna	6.130.000	0	0,00
Meja Rapat	0	2.500.000	0,00
Kursi Direktur 05 Hitam	0	7.500.000	0,00
Printer	0	4.100.000	0,00
Panel RPP	0	16.725.000	0,00
Maket RPP	0	14.175.000	0,00
LCD Projector/Infocus	12.100.000	12.100.000	0,00
Handy cam	0	12.978.450	0,00
LCD Monitor	0	2.000.000	0,00
Tripod	0	1.200.000	0,00
Kamera Digital	0	8.670.750	0,00
P.C. Unit	50.000.000	56.595.000	-11,65
Printer (Peralatan Personal Komputer)	20.120.000	33.324.000	-39,62
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	145.930.000	60.312.000	141,96
External/Portable Hardisk	0	3.000.000	0,00
Modem	0	229.000	0,00
Closet Circuit Television (CCTV)	0	14.985.600	0,00
Genset	0	14.495.000	0,00
Air Conditioning (AC)	4.250.000	14.700.000	0,00
Sound System	13.950.000	0	0,00
Locker	10.000.000	0	0,00
Brandkas	18.000.000	0	0,00
Lemari Besi/Metal	14.430.000	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	787.061.000	412.484.136	90,81
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	787.061.000	412.484.136	90,81

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.706.373.901*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.706.373.901 dan Rp14.475.322 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran dimana sisa UP/TUP sudah dipertanggung-jawabkan.

Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2018 dan
2017*

Keterangan	TH 2018	TH 2017
Uang Tunai	706.373.901	14.475.322
Bank MANDIRI No.acc 146.00.0556117.5	-	-
Jumlah	706.373.901	14.475.322

*Belanja
Dibayar di
Muka
Rp.199.910.400*

C.2 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp199.910.400 dan Rp 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2018 dan 2017

Jenis	TH 2018	TH 2017
Pembayaran rekening PDAM	1.031.800	-
Pembayaran Sewa Gudang Logistik	199.910.400	-

Persediaan

Rp3.247.617.445

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp3.247.617.445 dan Rp1.204.704.760. Bahwa terjadi peningkatan nilai persediaan per 31 Desember 2018 dari transfer masuk dari KPU Provinsi Kalbar barang persediaan untuk kegiatan Pemilu Serentak 2019 dan hasil Lelang Pengadaan barang persediaan untuk Pemilu Serentak 2019 dari KPU Kota Pontianak.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2018 dan 2017

Jenis	TH 2018	TH 2017
Barang Konsumsi	-	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	3.247.617.445	1.204.704.760
Jumlah	3.247.617.445	1.204.704.760

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Peralatan dan

Mesin

Rp2.260.894.595

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp.2.260.894.595 dan Rp.1.473.833.595. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	1.473.833.595
Mutasi tambah:	0
Pembelian	787.061.000
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	0
Saldo per 31 Desember 2018	2.260.894.595
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	-1.264.968.573
Nilai Buku per 31 Desember 2018	995.926.022

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- a. Pembelian 1 unit Station Wagon senilai Rp.275.240.000;
- b. Pembelian 9 buah Lap Top senilai Rp. 137.411.000;
- c. Pembelian 21 buah UPS senilai Rp. 79.500.000;
- d. Pembelian 6 buah Rak Besi Serbaguna senilai Rp.6.130.000;
- e. Pembelian 1 buah LCD Projector/Infocus senilai Rp.12.100.000;
- f. Pembelian 5 buah P.C Unit senilai Rp. 50.000.000;
- g. Pembelian 6 buah Printer (Peralatan Personal Komputer) senilai Rp. 20.120.000;
- h. Pembelian 6 buah Scanner (Peralatan Personal Komputer) senilai Rp. 145.930.000;
- i. Pembelian 1 buah AC 1 PK senilai Rp. 4.250.000;
- j. Pembelian 1 buah Sound System senilai Rp.13.950.000;
- k. Pembelian 2 buah Lemari Locker senilai Rp.10.000.000;
- l. Pembelian 1 buah Brandkas senilai Rp.18.000.000;
- m. Pembelian 4 buah Lemari Besi/Metal senilai Rp.14.430.000

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap Rp
(1.264.968.573)*

C.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp.(1.264.968.573) dan Rp.(1.084.414.509). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2018 dan 2017

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.260.894.595	1.264.968.573	995.926.022
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		2.260.894.595	1.264.968.573	995.926.022

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Lain-Lain
Rp .0 (Nihil)*

C.6 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp. 0 (Nihil),- dan Rp 100.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Berdasarkan surat persetujuan dari Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor: 1116/RT.01.3-SD/04/SJ/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 hal tentang persetujuan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan pada KPU Kota Pontianak, telah dilakukan pelelangan atas BMN dalam kondisi rusak berat. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	196.495.000
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2018	196.495.000
Akumulasi Penyusutan	(196.495.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	0

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp.(196.495.000)*

C.7 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp.(196.495.000) dan Rp.(196.395.000). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	196.495.000	-196.495.000	0
Jumlah	196.495.000	-196.495.000	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp.706.373.901*

C.8 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp.706.373.901 dan Rp.14.475.322. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Ekuitas
Rp 4.243.543.467*

C.9 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.4.243.543.467 dan Rp.6.045.323.240. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Pendapatan
PNBP
Rp. 33.253.918*

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 33.253.918 dan Rp. 20.465.091, Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Lain-lain	33.253.918	20.465.091	62
Jumlah	33.253.918	20.465.091	62

Pendapatan Lain-Lain merupakan hasil lelang persediaan berupa Kotak Suara dan Bilik Suara berbahan Aluminium keadaan rusak berat, hasil lelang BMN keadaan rusak berat, pengembalian Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu, belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari transaksi tahun 2018.

Beban Pegawai **D.2 Beban Pegawai**

Rp. 2.531.935.050 Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.2.531.935.050 dan Rp.2.327.133.121. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	860.099.702	517.196.347	66,30
Beban Tunjangan-tunjangan	1.642.450.348	1.799.967.774	-8,75
Beban Honorarium dan Vakasi	-	0	0
Beban Lembur	29.385.000	9.969.000	194,76
Jumlah	2.531.935.050	2.327.133.121	252,31

Beban

Persediaan

Rp.2.115.032.379

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.115.032.379 dan Rp.411.446.685. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	583.547.000	50.901.500	1.046,42
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga/Bahan Baku	1.531.485.379	360.545.185	324,77
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0
Jumlah	2.115.032.379	411.446.685	1.371,19

Beban Barang dan Jasa Rp. 23.723.688.196

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 23.723.688.196 dan Rp.2.592.958.415. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya tambahan kegiatan pendidikan dan pelatihan pada bulan Maret 2018. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	16.323.196.455	1.052.758.500	1450,52
Beban Langganan Daya dan Jasa	460.620.767	241.820.733	90,48
Beban Jasa Pos dan Giro	586.000	447.000	31,10
Beban Jasa Konsultan	0	0	0,00
Beban Jasa Profesi	12.050.000	11.500.000	0,00
Beban Jasa Lainnya	6.927.234.974	1.286.203.182	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	229.000	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00
Jumlah	23.723.688.196	2.592.958.415	814,93

Beban Pemeliharaan Rp. 107.385.129

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 107.385.129 dan Rp.31.051.000. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin.

Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.962.500	0	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	87.422.629	31.051.000	0,00
Beban Persediaan suku cadang	0	0	0,00
Jumlah	107.385.129	31.051.000	0,00

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp.864.925.807*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.864.925.807 dan Rp.335.509.966. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dalam rangka persiapan Pemilihan Serentak 2018. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	332.457.707	67.031.866	395,97
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	262.805.000	93.600.000	180,77
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	231.904.000	165.006.500	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	37.759.100	9.871.600	282,50
Jumlah	864.925.807	335.509.966	157,79

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp.0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 (nihil) dan Rp.0 (nihil) Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, KPU Kota Pontianak untuk meningkatkan pemahaman

masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada Tahun 2018. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.180.654.064

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.180.654.064 dan Rp.131.661.629. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2018 dan 2017

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	180.554.064	131.479.929	37,32
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	100.000	181.700	-
Jumlah Penyusutan	180.654.064	131.661.629	37,21
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	180.654.064	131.661.629	37,21

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

E.1 Ekuitas Awal

Rp.6.045.323.640

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.6.045.323.640 dan Rp.1.313.630.339.

Defisit LO

E.2 Surplus (Defisit) LO

Rp.29.127.706.407

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp.29.127.706.407 dan Rp.5.527.962.592. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Aset

Rp0

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp.0 (Nihil) dan Rp.0 (Nihil). Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Persediaan

Rp0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 (nihil) dan Rp0 (nihil). Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

Selisih

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi Aset Tetap Rp0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 (nihil) dan Rp0 (nihil).

Koreksi Aset

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Tetap Non Revaluasi Rp.0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp.0 (nihil) dan Rp.0 (Nihil). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2018

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp.0 (nihil) dan Rp.0 (nihil). Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi

E.4 Transaksi Antar Entitas

Antar Entitas Rp. 27.325.926.234

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.27.325.926.234 dan Rp. 10.259.655.493.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(33.253.918)
Ditagihkan ke Entitas Lain	9.505.121.381
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	1.697.955.687
Pengesahan Hibah Langsung	18.533.321.600
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(2.377.218.516)
Jumlah	27.325.926.234

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2018, DDEL sebesar Rp.(33.253.918) sedangkan DKEL sebesar Rp.(20.465.091)

Ekuitas Akhir
Rp. 4.243.543.467

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.243.543.467 dan Rp.6.045.323.240.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Setelah tanggal 31 Desember 2018 masih terdapat NPHD Hibah Barang dari Pemerintah Kota Pontianak TA 2018 dengan nilai perolehan barang sebesar Rp. 34.500.000 dengan nilai buku sebesar Rp. 20.700.000, berupa meja ½ biro sebanyak 4 buah, Sofa Kayu Jati sebanyak 1 set dan AC Portable sebanyak 1 unit yang belum diregister ke Kanwil DJPB Kalimantan Barat, mengingat masa untuk register sudah ditutup.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 17/KU.05-SD/02/SJ/I/2018 tanggal 9 Januari 2018, perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2018.
2. Menindaklanjuti dasar tersebut Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 1/HK.03.2-Kpt/6171/Sek-Kot/I/2018 Tanggal 10 Januari 2018 tentang Penunjukkan Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggun Jawab Kegiatan/Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak adalah :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Ana Suardiana
Pejabat Pembuat Komitmen	: Ana Suardiana
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Uray Yusnani
Bendahara	: Agus Prihartono

3. Bahwa Satker KPU Kota Pontianak telah melakukan Revisi Anggaran DIPA sebanyak 8 kali dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Revisi ke-01 dilakukan oleh KPA dalam rangka memasukan dana hibah berupa uang dari Pemerintah Kota Pontianak untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2018 di Kantor Wilayah DJPB Kalimantan Barat Petikan DIPA No. SP-DIPA.076.01.2.658532/2018 tanggal 9 Maret 2018, Digital Stamp: 2039-5971-1224-2502 menambah Pagu DIPA semula Rp 10.646.827.000 menjadi Rp.33.631.247.000, dengan rincian dana RM sebesar Rp.10.646.827.000 dan dana HDL sebesar Rp.22.984.420.000;
- 2) Revisi ke-02 dilakukan oleh eselon I dalam rangka pemenuhan belanja modal peralatan dan mesin, dengan Petikan DIPA No. SP-DIPA.076.01.2.658532/2018 tanggal 12 Juli 2018, Digital Stamp:7541-6890-2127-9946 menambah Pagu DIPA semula Rp.33.631.247.000 menjadi Rp.33.657.299.000, dengan rincian dana RM sebesar Rp.10.672.879.000 dan dana HDL sebesar Rp.22.984.420.000;
- 3) Revisi ke-03 dilakukan oleh eselon I dalam rangka pemenuhan belanja badan Ad Hoc Pemilu 2019 dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa Kendaraan Roda 4, dengan Petikan DIPA No. SP-DIPA.076.01.2.658532/2018 tanggal 02 Oktober 2018, Digital Stamp:7673-4790-6403-3936 mengurangi Pagu DIPA semula Rp.33.657.299.000 menjadi Rp.32.772.761.000 dengan rincian dana RM sebesar Rp.9.788.341.000 dan dana HDL sebesar Rp.22.984.420.000;
- 4) Revisi ke-04 administrasi dilakukan oleh KPA dalam rangka revisi halaman III DIPA, dengan Petikan DIPA

No. SP-DIPA.076.01.2.658532/2018 tanggal 11 Oktober 2018, Digital Stamp: 8107-5623-3486-0120, tidak merubah Pagu DIPA.

- 5) Revisi ke-05 dilakukan oleh eselon I dalam rangka pemenuhan belanja badan Ad Hoc Pemilu 2019 dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa alat penghitungan suara Pemilu 2019, dengan Petikan DIPA No. SP-DIPA.076.01.2.658532/2018 tanggal 13 Nopember 2018, Digital Stamp:9610-9020-7166-0044 menambah Pagu DIPA semula Rp.32.772.761.000 menjadi Rp.33.895.492.000 dengan rincian dana RM sebesar Rp.10.911.072.000 dan dana HDL sebesar Rp.22.984.420.000;
 - 6) Revisi ke-06 administrasi dilakukan oleh KPA dalam rangka revisi halaman III DIPA, dengan Petikan DIPA No. SP-DIPA.076.01.2.658532/2018 tanggal 28 Nopember 2018, Digital Stamp:9610-9020-7166-0044, tidak merubah Pagu DIPA;
 - 7) Revisi ke-07 administrasi dilakukan oleh KPA dalam rangka revisi halaman III DIPA, dengan Petikan DIPA No. SP-DIPA.076.01.2.658532/2018 tanggal 30 Nopember 2018, Digital Stamp:9610-9020-7166-0044, tidak merubah Pagu DIPA;
 - 8) Revisi ke-08 administrasi dilakukan oleh KPA dalam rangka revisi halaman III DIPA dan mengubah akun belanja modal peralatan dan mesin lainnya (536111) menjadi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin (532111), serta akun 521211 menjadi 521811 dalam rangka pemenuhan belanja persediaan bagi Pemilu 2019 berupa Alat kelengkapan TPS Pemilu 2019 dan Alat Peraga Kampanye. Petikan DIPA No. SP-DIPA.076.01.2.658532/2018 tanggal 31 Desember 2018, Digital Stamp:9610-9020-7166-0044, tidak merubah Pagu DIPA;
4. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan

Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam LHP Nomor: 37/LHP/XIX/PNK/12/2014 tanggal 01 Desember 2014, KPU Kota Pontianak telah melaksanakan tindak lanjut atas LHP TA. 2013-2014 dan LHP Pemilu TA 2009 tersebut sebagaimana terlampir dalam laporan keuangan ini.

5. Bahwa Satker KPU Kota Pontianak telah melaksanakan penandatanganan MoU hibah langsung berupa uang untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2018 dengan Pemerintah Kota Pontianak pada tanggal 24 Juli 2017, sebagai berikut:

- a) Pemberi Hibah yaitu Pemerintah Kota Pontianak;
- b) No dan tgl NPHD: No. 117/SPH-VII/2017 dan No. 190/PP.01.3-SPj/6171/KPU-Kot/VII/2017 tgl. 24-07-2017;
- c) Peruntukan hibah: pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2018;
- d) Nilai dalam NPHD sebesar Rp. 24.871.706.000 pembayaran dilakukan sebanyak 2 kali transfer, transfer pertama sebesar Rp.6.338.384.400 pada tahun 2017 dan transfer kedua sebesar Rp. 18.533.321.600 di tahun 2018. yang sudah diterima oleh KPU Kota Pontianak total sebesar Rp.24.871.706.000;
- e) Bahwa KPU Kota Pontianak telah melakukan revisi untuk memasukan dana hibah ke dalam DIPA BA 076 KPU Kota Pontianak sebesar Rp.22.984.420.000; dengan rincian dana hibah sisa transfer tahap 1 sebesar Rp.4.451.098.400, dan dana hibah transfer tahap 2 sebesar Rp.18.533.321.600. sehingga merubah pagu DIPA BA 076, semula Rp 10.646.827.000 menjadi Rp.33.631.247.000;

- f) Bahwa KPU Kota Pontianak telah mengesahkan pendapatan hibah di tahun 2018 sebesar Rp.18.533.321.600 dan belanja hibah sebesar Rp.20.607.202.878, telah mengajukan SP2HL ke KPPN Pontianak di triwulan 4, SPJ dari bulan Januari s.d. 31 Oktober 2018 sebagai berikut:
- 1) Nomor SP2HL 00270/SP2HL/XII/2018 tanggal. 12-12-2018, nomor SPHL 170420500460002 tanggal 13-12-2018;
 - 2) Terdapat selisih Rp. 1.394 ketika dilakukan revisi DIPA sebesar Rp.22.984.412.394 namun tercatat di DIPA KPU Kota Pontianak sebesar Rp.22.984.420.000 merupakan pecahan yang dibulatkan kebawah oleh aplikasi RKA-KL DIPA;
 - 3) Bahwa KPU Kota Pontianak telah menyetorkan jasa giro bank atas dana hibah yang di simpan pada Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak ke Rekening Kas Daerah dengan nomor: 1001002830 setiap akhir bulan berkenaan;
 - 4) Bahwa KPU Kota Pontianak telah mengembalikan sisa Dana Hibah Langsung berupa Uang untuk membiayai kegiatan Pilwako Pontianak Tahun 2018 ke pemberi hibah sebesar Rp.2.377.218.516 sebanyak 2 (dua) kali, dan telah mengajukan SP4HL ke KPPN Pontianak dengan Nomor: 00275/SP4HL/XII/2018 tanggal 31-12-2018, dan telah terbit SP3HL dengan Nomor: 180420500310001 tanggal 31-12-2018;
 - 5) Bahwa KPU Kota Pontianak telah mengajukan penutupan rekening Hibah ke Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak nama rekening RPL 042 KPU KOTA PTK 21YUX8EA dan nomor rekening 1001015059, dan telah terbit surat penutupan rekening dari Bank

dengan Nomor: PTK/KCU-PEL/1564/2018 tanggal 02-11-2018;

- 6) Bahwa KPU Kota Pontianak telah mengajukan penutupan rekening dana Hibah ke KPPN Pontianak;
6. Bahwa masih terdapat sisa UP sebesar Rp. 104.650.000 dan sisa TUP sebesar Rp. 601.723.901 di periode akhir laporan tanggal 31 Desember 2018;
7. Bahwa sisa UP dan TUP telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 2 Januari 2018, NTPN untuk sisa UP: 56580171IV3F7MRR, NTB: 190102004236. NTPN untuk sisa TUP: 2FE0A172UAOTV3RR, NTB: 190102004238, dan sudah dibuatkan SPTJM dari KPA terkait keterlambatan penyetoran sisa dana tersebut dengan nomor: 117/KU.02.5-SY/6171/Sek-Kot/II/2018 tanggal 02 Februari 2018
8. Bahwa KPU Kota Pontianak terdapat PNBPN sebesar Rp.33.253.918 dari hasil sebagai berikut:
 - 1) Lelang kotak suara dan bilik suara Pemilu 2004 dan kotak suara dan bilik suara Pemilu 2009 berbahan aluminium dalam keadaan rusak berat yang dilaksanakan oleh KPKNL Pontianak. Hasil lelang tersebut telah disetor ke Kas Negara dengan NTPN: 0112C875SU312V49 NTB: 000000031791 sebesar Rp.30.344.000;
 - 2) Lelang sebagian BMN dalam keadaan rusak berat dengan cara melaksanakan lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Pontianak. Hasil lelang tersebut telah disetor ke Kas Negara dengan NTPN: 53C9C875N3QOM879 NTB: 000000491222 sebesar Rp. 2.580.000;
 - 3) Pengembalian Penerimaan kembali Belanja Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu hasil temuan Inspektorat Jenderal KPU telah disetor ke Kas Negara dengan NTPN: 8A69C70R80N0KA6M NTB: 000020791106 sebesar Rp. 329.918.

9. Bahwa KPU Kota Pontianak telah melakukan pengusulan penghapusan BMN sudah rusak berat di Aplikasi SIMAK BMN dan masih menunggu SK Penghapusan dari Pusat.
10. Bahwa terdapat Surplus/Defisit Pelepasan Non Aset Non Lancar sebesar Rp. 32.924.000 dari lelang kotak suara dan bilik suara Pemilu 2004 keadaan rusak berat, dan kotak suara dan bilik suara Pemilu 2009 keadaan rusak berat, yang merupakan barang persediaan. Selain itu merupakan tambahan dari hasil lelang BMN keadaan rusak berat;
11. Bahwa KPU Kota Pontianak telah mencatat atas beban langganan air bulan Desember 2018 sebesar Rp.1.031.800;
12. Bahwa KPU Kota Pontianak telah mencatat atas belanja sewa gudang sementara ke dalam neraca sebagai akun belanja dibayar di muka sebesar Rp.67.952.000 (hasil audit BPK RI atas LK KPU RI Semester II TA 2018);
13. Bahwa KPU Kota Pontianak telah mencatat atas belanja sewa gudang ke dalam neraca sebagai akun belanja dibayar di muka sebesar Rp.131.958.400 (hasil audit BPK RI atas LK KPU RI Semester II TA 2018);
14. Bahwa berdasarkan Addendum Naskah Hibah Perjanjian Daerah Nomor: 972/2334/BPKPD dan 1/PR.07-SPj/01/Prov/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017, KPU Kota Pontianak menerima dana hibah yang diterima dari KPU Provinsi Kalbar sebesar Rp.2.519.302.700, dengan realisasi sebesar Rp.1.723.349.159 dan saldo sebesar Rp.795.953.541, sisa dana tersebut disetor kembali ke rekening RPL KPU Provinsi Kalbar sebesar Rp.795.953.541 pada tanggal 28 September 2018.

KPU Kota Pontianak
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31-12-2017	Tahun 2018	Per 31-12-2018	Per 31-12-2018
A	Tanah						
1	Tanah	-	0	-	-	-	-
	Jumlah		0	-	-	-	-
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	737.240.000	462.000.000	19.660.000	481.660.000	255.580.000
2	Alat Pengolahan	5	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-
3	Alat Kantor	5	145.952.000	55.572.800	14.812.200	70.385.000	75.567.000
4	Alat Rumah Tangga	5	90.711.450	62.190.845	5.380.690	67.571.535	23.139.915
5	Alat Studio	5	133.707.672	51.642.372	8.707.300	60.349.672	73.358.000
6	Alat Komunikasi	5	13.800.000	13.105.000	695.000	13.800.000	-
7	Alat Kedokteran	5	12.500.000	6.500.000	1.500.000	8.000.000	4.500.000
8	Unit Alat Laboratorium	5	1.200.000	75.000	150.000	225.000	975.000
9	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	5	25.600.000	12.106.664	1.706.667	13.813.331	11.786.669
10	Alat Khusus Kepolisian	4	8.670.750	1.083.844	2.167.688	3.251.532	5.419.218
11	Komputer Unit	4	708.155.122	349.440.953	72.998.709	422.439.662	285.715.460
12	Peralatan Komputer	4	324.932.572	71.050.697	46.785.000	117.835.697	207.096.875
13	Alat Kerja Penerbangan	4	48.430.600	2.209.030	4.630.560	6.839.590	41.591.010
14	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	4	14.175.000	1.417.500	1.417.500	2.835.000	11.340.000
	Jumlah		2.266.575.166	1.089.894.705	180.611.314	1.270.506.019	996.069.147
C	Aset Lainnya						
	Aset yang dihentikan penggunaannya						-
1	Alat Kantor	5	817.000	817.000	-	817.000	-
2	Alat Rumah Tangga	5	7.475.000	7.475.000	-	7.475.000	-
3	Alat Studio	5	3.895.000	3.795.000	100.000	3.895.000	-
4	Alat Kedokteran	5	5.275.000	5.275.000	-	5.275.000	-
5	Komputer Unit	4	150.600.000	150.600.000	-	150.600.000	-
6	Peralatan Komputer	4	28.433.000	28.433.000	-	28.433.000	-
	Jumlah		196.495.000	196.395.000	100.000	196.495.000	0
	Total		2.463.070.166	1.286.289.705	180.711.314	1.467.001.019	996.069.147

* Beban Amortisasi

Lampiran II: Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

KPU KOTA PONTIANAK
DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG
PER 31 DESEMBER 2018

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
1	PEMKOT PONTIANAK	Uang	DN	Rp 24.871.706.000	Rp 24.871.706.000	Rp -	Selesai Pengesahan
Jumlah				Rp 24.871.706.000	Rp 24.871.706.000	Rp -	